



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA LT.7 UTARA (APT),
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230; FAKSIMILE (021) 3442948; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

Catatan Hasil Forum Penelaahan

Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG RI

Tahun Anggaran : PERUBAHAN RKBMN TA 2025

A RKBMN untuk Pengadaan

Dari hasil Forum Penelaahan dengan Mahkamah Agung RI, BMN yang diusulkan pengadaan dan skema pemenuhan dapat disajikan sebagai usulan yang DISETUJUI dan TIDAK DISETUJUI sebagaimana berikut:

NO	URAIAN	USULAN				DISETUJUI								TIDAK DISETUJUI	
		SEMULA		MENJADI		SK PEMBELIAN		SK SEWA		SK BMN IDLE					
		UNIT/BID	LUAS	UNIT/BID	LUAS	UNIT/BID	LUAS	UNIT/BID	LUAS	UNIT/BID	LUAS	UNIT/BID	LUAS	UNIT/BID	LUAS
1	Tanah untuk Kantor (TB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bangunan Gedung untuk Kantor (TB)	0	0	6	18.034	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18.034
3	Tanah untuk Rumah Negara (RN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bangunan Gedung untuk Rumah Negara (RN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tanah untuk Bangunan Persidangan (BS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bangunan Gedung untuk Bangunan Persidangan (BS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tanah untuk Bangunan Pendidikan (BP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bangunan Gedung untuk Bangunan Pendidikan (BP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tanah untuk Bangunan RUTAN/LP (BT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bangunan Gedung untuk Bangunan RUTAN/LP (BT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kendaraan Dinas Jabatan (AA)	0	0	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kendaraan Dinas Operasional (AO)	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	105	18.034	99	0	0	0	0	0	0	0	6	18.034

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Usulan Perubahan RKBMN pengadaan TA 2025, berupa 93 (Sembilan puluh tiga) unit Kendaraan Dinas Jabatan melalui mekanisme pembelian **pada prinsipnya dapat dipertimbangkan untuk disetujui dengan mempertimbangkan Instruksi Presiden terkait Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.**
- Usulan Perubahan RKBMN pengadaan TA 2025, berupa 6 (enam) unit Kendaraan Dinas Operasional melalui mekanisme pembelian **pada prinsipnya dapat dipertimbangkan untuk disetujui dengan mempertimbangkan Instruksi Presiden terkait Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.**
- Usulan Perubahan RKBMN pengadaan TA 2026, berupa 6 (enam) unit dengan luas 18.034 m² berupa Bangunan Gedung untuk Kantor Pemerintah melalui mekanisme pembelian **pada prinsipnya tidak dapat disetujui**, karena optimalisasi existing BMN (BMN existing unit sudah memenuhi kebutuhan) dan tidak sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK).

B RKBMN untuk Pemeliharaan

Dari hasil Forum Penelaahan dengan Mahkamah Agung RI, BMN yang diusulkan pemeliharaan dan skema pemenuhan dapat disajikan sebagai usulan yang DISETUJUI dan TIDAK DISETUJUI sebagaimana tabel berikut:

NO	URAIAN	USULAN				DISETUJUI		TIDAK DISETUJUI		
		SEMULA		MENJADI		UNIT/ BIDANG	LUAS	UNIT/ BIDANG	LUAS	
		UNIT/ BIDANG	LUAS	UNIT/ BIDANG	LUAS					
1	Alat Angkut Bermotor Darat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Alat Angkut Bermotor Apung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Alat Angkut Bermotor Udara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gedung dan Bangunan	0	0	4	4.557	4	4.557	0	0	0
5	Jalan dan Jembatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bangunan Air	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BMN Lainnya	0	0	7	10.073	7	10.073	0	0	0
Total		0	0	11	14.630	11	14.630	0	0	0

Dengan penjelasan sebagai berikut:



Kuantitas BMN yang diusulkan pemeliharaannya adalah sebesar 11 unit dan 14.630 m². Dari jumlah yang diusulkan tersebut, yang disetujui sebesar 11 unit dan 14.630 m².

C RKBMN untuk RP3BMN

Dari hasil Forum Penelaahan dengan Mahkamah Agung RI, BMN yang diusulkan RP3BMN dan skema pemenuhan dapat disajikan sebagai usulan yang **DISETUJUI** dan **TIDAK DISETUJUI** sebagaimana tabel berikut:

NO	URAIAN	USULAN		DISETUJUI	TIDAK DISETUJUI
		SEMULA	MENJADI		
1	Pemanfaatan	0	0	0	0
2	Pemindahtanganan	0	131	131	0
3	Penghapusan	0	32	32	0
Total		0	163	163	0

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kuantitas BMN yang disetujui pemindahtanganannya yakni keseluruhan dari yang diusulkan sebesar 131 unit.
2. Kuantitas BMN yang disetujui penghapusannya yakni keseluruhan dari yang diusulkan sebesar 32 unit.

D Informasi Lainnya

Dalam forum penelaahan dimaksud juga diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Bahwa forum penelaahan antara Kementerian Keuangan c.q. DJKN dengan Mahkamah Agung RI dilaksanakan secara *online meeting* dan dihadiri oleh perwakilan APIP Mahkamah Agung RI. Kesepakatan yang dituangkan dalam Catatan Hasil Forum Penelaahan telah disetujui oleh para pihak dalam forum penelaahan.
2. Usulan Pengadaan yang diluar Standar Barang dan Standar Kebutuhan dapat diajukan pengadaannya melalui mekanisme Non RKBMN.
3. Usulan Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Kantor Pemerintah dengan memperhatikan BMN eks BMN Idle sebagai Alternatif Pemenuhan Kebutuhan BMN.
4. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7/2022 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-298/MK.6/2023 tanggal 15 April 2023, untuk persetujuan Pengadaan berupa Kendaraan Bermotor, baik kendaraan jabatan maupun kendaraan operasional agar diprioritaskan pada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

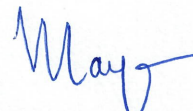
Jakarta,

Kabag Tata Laksana
Pengadaan Barang I,
Mahkamah Agung RI



Marwendi Putra

Kasubdit PKN I
Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara



Maya Sartika